



TESIS

Judul:

EKSEKUSI SECARA PAKSA PUTUSAN PENGADILAN
YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP
DALAM PERKARA PERDATA YANG TIDAK
DILAKSANAKAN PEMDA PROVINSI
DKI JAKARTA

Disusun oleh:

SOFIAN
NIM. 207211021

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2024

**EKSEKUSI SECARA PAKSA PUTUSAN PENGADILAN
YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP DALAM
PERKARA PERDATA YANG TIDAK DILAKSANAKAN
PEMDA PROVINSI DKI JAKARTA**

TESIS

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara**

Oleh:

**Nama : Sofian
NIM : 207211021**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA 2024**

Persetujuan

Nama : SOFIAN
NIM : 207211021
Program Studi : MAGISTER HUKUM
Judul : EKSEKUSI SECARA PAKSA PUTUSAN PENGADILAN
YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP DALAM
PERKARA PERDATA YANG TIDAK DILAKSANAKAN
PEMDA PROVINSI DKI JAKARTA

Tesis ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 07-Desember-2023

Pembimbing:
RICHARD C.ADAM, S.H., LL.M., Dr.
NIK/NIP: 10215009



A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'R. Adam', is written above a horizontal line.

ABSTRAK

- (A) Nama : Sofian (NIM: 207211021)
- (B) Judul : Eksekusi secara paksa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara perdata yang tidak dilaksanakan Pemda Provinsi DKI Jakarta
- (C) Halaman : 159
- (D) Kata Kunci : Hukum, Pemda DKI, Pelaksanaan Eksekusi, Putusan
- (E) Isi : Penelitian ini memiliki permasalahan utama terkait eksekusi secara paksa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara perdata yang tidak dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta (Pemda DKI). Permasalahan tersebut terkait dengan ketidakpatuhan Pemda DKI Jakarta dalam melaksanakan putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap, seperti yang dijelaskan dalam kasus PT. Bunga Lestari. Kendala-kendala apa yang dihadapi oleh pihak yang menang dalam melaksanakan putusan pengadilan terhadap Pemda DKI Jakarta menjadi fokus penelitian ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis ketentuan eksekusi secara paksa terkait keputusan pengadilan yang sudah final dalam kasus perdata berdasarkan hukum acara perdata. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis pertimbangan majelis hakim dalam pelaksanaan eksekusi secara paksa terhadap Pemerintah Daerah (Pemda) DKI Jakarta atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 09/2021.Eks Jo. No. 614/PDT.G/2014/PN.JKT.PST Jo. No. 42/PDT/2017/PT.DKI Jo. No. 358K/PDT/2018 Jo. No. 706PK/PDT/2019 Jo. Permohonan Eksekusi Terhadap Pemda Provinsi DKI No. 31/SnCo/Eks.Pts/VIII/2021. Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier diperoleh dari tinjauan literatur, termasuk putusan pengadilan dan dokumen hukum terkait. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian di perpustakaan dan lapangan, sedangkan analisis data menggunakan metode analisis kualitatif dengan

interpretasi rasional dan obyektif, serta teknik hukum konstruktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksekusi putusan pengadilan terkendala oleh berbagai faktor, termasuk terbatasnya pelaksana eksekusi, anggaran yang terbatas, perlawanan pihak ketiga, dan Peninjauan Kembali. Implikasinya, pihak instansi pemerintah, seperti Pemda DKI Jakarta, menghadapi hambatan dalam pelaksanaan eksekusi, terutama dalam kewajiban pembayaran berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, di mana pemerintah tidak menganggarkan dana sesuai putusan pengadilan. Upaya pelaksanaan eksekusi secara paksa terhadap Pemda DKI Jakarta telah mematuhi ketentuan hukum acara perdata, karena pemerintah daerah tersebut tidak melaksanakan secara sukarela putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Implikasinya, mekanisme eksekusi dilakukan oleh Pengadilan Negeri (PN), termasuk penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk pembayaran sejumlah uang yang diwajibkan oleh putusan pengadilan.

(F) Acuan : 93 (1982 – 2023)

(G) Pembimbing : Richard C. Adam, S.H., LL.M., Dr.

ABSTRACT

- (A) Name : Sofian (NIM: 207211021)
- (B) Title : Forced execution of court decisions that have permanent legal force in civil cases that are not implemented by the regional government of DKI Jakarta Province.
- (C) Pages : 159
- (D) Keywords : Law, DKI Regional Government, Execution, Decision
- (E) Content : This research has the main problem related to the forced execution of court decisions that have permanent legal force in civil cases which are not implemented by the DKI Jakarta Provincial Government (Pemda DKI). This problem is related to the DKI Jakarta Regional Government's non-compliance in implementing court decisions that already have permanent legal force, as explained in the PT Bunga Lestari case. The obstacles faced by the winning party in implementing the court decision against the DKI Jakarta Regional Government are the focus of this research. The purpose of this research is to determine and analyze the provisions for forced execution related to final court decisions in civil cases based on civil procedural law. In addition, this research aims to understand and analyze the considerations of the panel of judges in carrying out the forced execution of the Regional Government (Pemda) of DKI Jakarta based on the decision of the Central Jakarta District Court No. 09/2021.Eks Jo. No. 614/PDT.G/2014/PN.JKT.PST Jo. No. 42/PDT/2017/PT. DKI Jo. No. 358K/PDT/2018 Jo. No. 706PK/PDT/2019 Jo. Request for Execution Against the DKI Provincial Government No. 31/SnCo/Eks.Pts/VIII/2021. This research methodology uses a normative juridical approach with statutory, conceptual and case approaches. Secondary data in the form of primary, secondary and tertiary legal materials was obtained from literature reviews, including court decisions and related legal documents. Data collection techniques are carried out through research in libraries and the field, while data analysis uses qualitative analysis methods with rational and objective interpretation, as well as constructive legal techniques. The research results show that the execution

of court decisions is hampered by various factors, including limited executors, limited budgets, third party resistance, and judicial review. The implication is that government agencies, such as the Regional Government of DKI Jakarta, face obstacles in carrying out executions, especially in terms of payment obligations based on court decisions that have permanent legal force, where the government does not allocate funds according to court decisions. The attempt to carry out the forced execution of the DKI Jakarta Regional Government has complied with the provisions of civil procedural law, because the regional government did not voluntarily implement the court decision which has permanent legal force. The implication is that the execution mechanism is carried out by the District Court (PN), including the use of the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) to pay the amount of money required by the court decision.

- (F) References : 93 (1982 – 2023)
- (G) Supervisor : Richard C. Adam, S.H., LL.M., Dr.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Atas izin dan penyertaan-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Tesis ini berjudul **“EKSEKUSI SECARA PAKSA PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP DALAM PERKARA PERDATA YANG TIDAK DILAKSANAKAN PEMDA PROVINSI DKI JAKARTA”**. Tesis ini disusun guna memenuhi syarat dalam menyelesaikan program studi strata II Ilmu Hukum dan menempuh ujian akhir guna memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

Dengan tersusunnya tesis ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan membimbing penulis hingga tesis ini selesai disusun. Ucapan terima kasih yang tulus ini disampaikan, kepada:

1. Prof. Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H., selaku ketua Yayasan Universitas Tarumanagara;
2. Prof. Dr. Ir. Agustinus Purna Irawan, M. T., M.M., I.P.U., ASEAN Eng. Selaku Rektor Universitas Tarumanagara;
3. Prof. Dr. Rasji S.H., M.H., selaku wakil Rektor Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
4. Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
5. Prof. Dr. Jeane Neltje Saly, S.H., M.H., APU selaku Ketua Program Studi Pasca Sarjana (S2) Magister Hukum Fakultas Universitas Tarumanagara;
6. Richard C. Adam, S.H.,LL.M.,Dr. selaku dosen pembimbing penulis yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dengan sabar, serta atas ilmu-ilmu yang telah diberikan selama penulis melaksanakan bimbingan tesis;
7. Ibu Christine S. T. Kansil, S.H., M.H., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;

8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namanya, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan dan diajarkan dengan ikhlas.

Pernyataan

Nama : SOFIAN
NIM : 207211021
Program Studi : MAGISTER HUKUM
Judul : EKSEKUSI SECARA PAKSA PUTUSAN PENGADILAN
YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP DALAM
PERKARA PERDATA YANG TIDAK DILAKSANAKAN
PEMDA PROVINSI DKI JAKARTA

Dengan ini menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil kerja saya sendiri di bawah bimbingan Tim Pembimbing dan bukan hasil plagiasi dan/atau kegiatan curang lainnya.

Jika saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 07-Desember-2023
Yang menyatakan



SOFIAN
NIM. 207211021

DAFTAR ISI

COVER LUAR	i
COVER DALAM	ii
PERSETUJUAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	viii
PERNYATAAN	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kegunaan Penelitian	11
E. Kerangka Teoritik	12
1. Teori Perlindungan Hukum	12
2. Teori Kepastian Hukum	14
3. Teori Keadilan	19
F. Metode Penelitian	22
1. Jenis Penelitian	22
2. Metode Pendekatan Penelitian	23
3. Jenis dan Sumber Data	26
4. Teknik Pengumpulan Data	28
5. Teknik Analisis.....	28
G. Sistematika Penulisan	29

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	32
A. Perjanjian	32
1. Definisi Perjanjian	32
2. Syarat dan Sahnya Perjanjian	35
3. Asas-Asas Perjanjian	41
4. Jenis-Jenis Perjanjian	46
5. Pengakhiran Perjanjian.....	47
B. Wanprestasi Atas Perjanjian	52
C. Pemerintah Daerah	56
1. Pengertian Pemerintah Daerah	56
2. Kewenangan Pemerintah Daerah	63
D. Perkara Perdata	69
E. Putusan Pengadilan	71
F. Eksekusi	75
1. Eksekusi Secara Sukarela	75
2. Eksekusi Secara Paksa	76
G. Teori Hukum	76
1. Teori Perlindungan Hukum	77
2. Teori Kepastian Hukum	80
3. Teori Keadilan	84
BAB III HASIL PENELITIAN	89
A. Identitas Para Pihak	89
1. PT. Bunga Lestari	89
2. Kepala Planetarium dan Observatorium Provinsi DKI Jakarta	89
3. Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta	99
4. Kepala Daerah/Gubernur Provinsi DKI Jakarta	99
B. Hubungan Para Pihak Berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Pegadaian Digital Velvet System atau 10 Channel Power Dome (Hardware) No. 1047/2013 tanggal 20 Agustus 2013	99
C. Kasus Posisi	100

D.	Pertimbangan Hakim (<i>Ratio Decidendi</i>) dalam Perkara Antara PT. Bunga Lestari Melawan Pemda DKI Jakarta	107
1.	Pertimbangan Hakim (<i>Ratio Decidendi</i>) dalam Putusan PN Jakarta Pusat No. 614/PDT.G/2014/PN.JKT.PST	107
2.	Pertimbangan Hakim (<i>Ratio Decidendi</i>) dalam Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat No. 42/PDT/2017/PT.DKI	108
3.	Pertimbangan Hakim (<i>Ratio Decidendi</i>) dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 385K/PDT/2018	109
4.	Pertimbangan Hakim (<i>Ratio Decidendi</i>) dalam Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No. 706PK/PDT/2019	110
5.	Pertimbangan Hakim (<i>Ratio Decidendi</i>) dalam Penetapan Eksekusi Ketua PN Jakarta Pusat No. 09/2021.Eks.....	112
E.	Amar Putusan dan Amar Penetapan	114
1.	Amar Putusan Pada PN Jakarta Pusat No. 614/PDT.G/2014/PN.JKT.PST	114
2.	Amar Putusan Pada Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat No. 42/PDT/2017/PT.DKI	114
3.	Amar Putusan Pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 385K/PDT/2018	115
4.	Amar Putusan Pada Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No. 706PK/PDT/2019	115
5.	Amar Penetapan Pada PN Jakarta Pusat No. 09/2021.Eks	116
F.	Berita Acara Eksekusi	117
G.	Daftar Hasil Wawancara Narasumber.....	119
BAB IV ANALISIS DATA		121
A.	Ketentuan Eksekusi Secara Paksa Atas Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Dalam Perkara Perdata Berdasarkan Hukum Acara Perdata	121
B.	Pertimbangan majelis hakim dalam pelaksanaan eksekusi secara paksa terhadap Pemda DKI Jakarta atas putusan PN Jakarta Pusat	

No. 09/2021.Eks Jo. No. 614/PDT.G/2014/PN.JKT.PST Jo. No. 42/PDT/2017/PT.DKI Jo. No. 358K/PDT/2018 Jo. No. 706PK/PDT/2019 Jo. Permohonan Eksekusi Terhadap Pemda Provinsi DKI No. 31/SnCo/Eks.PTS/VIII/2021	141
BAB V PENUTUP	156
A. Kesimpulan	156
B. Saran	158
DAFTAR PUSTAKA	160
DAFTAR LAMPIRAN	169

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	:	Daftar Riwayat Hidup
Lampiran 2	:	Surat Tugas Penunjukkan Dosen Pembimbing
Lampiran 3	:	Rekap Bimbingan Skripsi
Lampiran 4	:	Surat Keterangan Turnitin
Lampiran 5	:	Surat Hasil Turnitin
Lampiran 6	:	Letter of Acceptance Jurnal
Lampiran 7	:	Bukti Terbit Jurnal
Lampiran 8	:	Bukti Wawancara
Lampiran 9	:	Putusan Pengadilan